

## SEJARAH LOKAL KAMPUNG KACUNG DI BANGKA BARAT (1900–1949): DARI PERMUKIMAN NOMADEN KE DESA PASCA-KEMERDEKAAN

Mahendra<sup>1</sup>, Farida R. Wargadalem<sup>2</sup>, Helen Susanti<sup>3</sup>  
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya  
[Syahputramalinnew@gmail.com](mailto:Syahputramalinnew@gmail.com)<sup>1</sup>, [Farida\\_wd@fkip.unsri.ac.id](mailto:Farida_wd@fkip.unsri.ac.id)<sup>2</sup>, [helensusanti97@gmail.com](mailto:helensusanti97@gmail.com)<sup>3</sup>

### *Abstract*

Kajian ini diarahkan untuk merekonstruksi sejarah Kampung Kacung di Bangka Barat dalam kerangka rezim kolonialisme sebagai relasi kuasa dan pembentukan konstruksi jati diri sosial kontemporer. Selama ini, asal-usul kampung tersebut lebih banyak hidup dalam bentuk folklore dan ingatan kolektif komunitas lokal tanpa dokumentasi akademik yang sistematis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode heritage oral history dan kajian pustaka kritis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tokoh komunitas lokal, keturunan pendiri kampung, serta warga lanjut usia, kemudian dianalisis secara tematik dan interpretatif dengan triangulasi literatur mutakhir. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembentukan Kampung Kacung berawal dari fase pra-pemukiman yang ditandai mobilitas tenaga kerja dalam orbit ekonomi tambang timah, kemudian terintegrasi dalam struktur administrasi rezim kolonial melalui sistem afdeling dan pembagian Ketapik Timur–Barat. Pembangunan infrastruktur jalan pascaperlawanan Depati Amir memperkuat pengawasan rezim kolonial, sementara struktur pajak mengikat komunitas lokal dalam sistem ekonomi yang menghasilkan stratifikasi sosial. Dalam konteks tersebut, istilah “kacung” muncul sebagai label subordinatif yang merefleksikan posisi kerja rendah dalam hierarki rezim kolonial. Akan tetapi, melalui proses historis termasuk institusionalisasi kampung tahun 1946 dan pengalaman Agresi Militer Belanda I serta Agresi Militer Belanda II, konstruksi jati diri tersebut mengalami transformasi menjadi simbol solidaritas dan ketahanan komunitas. Kajian ini menegaskan bahwa sejarah lokal bukan semata merekam dominasi rezim kolonial, tetapi juga memperlihatkan kapasitas komunitas lokal dalam mereartikulasi konstruksi jati dirinya secara kolektif.

**Kata Kunci:** sejarah lokal, rezim kolonialisme, konstruksi jati diri sosial, heritage oral history, Bangka Barat, Kampung Kacung

### *Abstract*

*This study is aimed at reconstructing the history of Kampung Kacung in West Bangka within the framework of colonialism as a relation of power and the formation of contemporary social identity construction. Until now, the origins of the village have mostly existed in the form of folklore and the collective memory of the local community without systematic academic documentation. The research uses a qualitative approach with methods of heritage oral history and critical literature review. Data was obtained through in-depth interviews with local community leaders, descendants of the village founders, as well as elderly residents, and was then analyzed thematically and interpretatively with the triangulation of recent literature. Research results show that the formation of Kampung Kacung began from the pre-settlement phase, marked by labor mobility within the tin mining economic orbit, and then integrated into the administrative structure of the colonial regime through the afdeling system and the East–West Ketapik division. The construction of road infrastructure after Depati Amir's resistance strengthened the colonial regime's oversight, while the tax structure tied the local community into an economic system that produced social stratification. In this context, the term "kacung" emerged as a subordinative label reflecting a low work position within the colonial regime hierarchy. However, through historical processes, including the institutionalization of the village in 1946 and the experiences of the First and Second Dutch Military Aggressions, this identity construction transformed into a symbol of community solidarity and resilience. This study emphasizes that local history does not merely record the domination of the colonial regime, but also demonstrates the capacity of the local community to rearticulate the construction of its identity collectively.*

**Keywords:** local history, colonialism regime, social identity construction, oral history heritage, West Bangka, Kacung Village

## PENDAHULUAN

Sejarah lokal sering kali tersisih dalam arus besar historiografi nasional yang lebih menekankan pada peristiwa makro seperti perlawanan nasional,

transformasi ekonomi rezim kolonial, atau dinamika politik elite. Padahal, dalam pendekatan mikro-historis, sejarah kampung dapat dipahami sebagai ruang penting untuk memahami bagaimana kebijakan

rezim kolonial bekerja secara konkret dalam kehidupan sehari-hari komunitas lokal. Kampung Kacung di Bangka Barat dapat dipahami sebagai contoh komunitas yang sejarahnya hidup dalam ingatan kolektif dan tradisi lisan, tetapi belum pernah terdokumentasi secara akademik. Selama ini narasi tentang kampung tersebut hanya diwariskan secara turun-temurun sebagai folklore lokal tanpa analisis ilmiah yang mengaitkannya dengan struktur rezim kolonialisme dan pembentukan konstruksi jati diri sosial.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber lokal, wilayah yang kini dikenal sebagai Kampung Kacung pada awal 1900-an dapat dipahami sebagai kawasan hutan yang belum menjadi permukiman permanen. Wilayah tersebut dihuni satwa liar seperti kijang dan pelanduk, sementara manusia yang tinggal di sekitarnya hidup dalam pola mobilitas tinggi. Mereka tidak terikat kontrak tanah maupun administrasi formal, dan berpindah-pindah mengikuti kebutuhan ekonomi serta akses terhadap sumber daya alam. Pola ini sejalan dengan temuan Tania Murray (Li, 2017) dalam *Journal of Peasant Studies* yang menjelaskan bahwa komunitas lokal di wilayah rezim kolonial luar Jawa sering kali mempertahankan mobilitas sebagai strategi bertahan sebelum penetrasi administratif negara rezim kolonial semakin intensif. Oleh sebab itu, keterangan narasumber mengenai kehidupan semi-nomaden tersebut bukan sekadar cerita folklorik, melainkan memiliki landasan empiris dalam kajian agraria dan rezim kolonialisme Asia Tenggara.

Perubahan struktural mulai terjadi ketika pemerintah rezim kolonial Belanda memperkuat sistem administrasi wilayah di Bangka melalui pembagian distrik dan onderdistrik. Dalam konteks ini, wilayah Ketapik terbagi menjadi Ketapik Timur dan Ketapik Barat, yang dalam ingatan kolektif komunitas lokal kemudian diidentifikasi sebagai Dendang (Timur) dan Kacung (Barat). Pembagian ini bukan semata-mata administratif, melainkan bagian dari strategi teritorial rezim kolonial untuk memudahkan pengawasan dan pengumpulan pajak. Peluso & Vandergeest (Peluso & Vandergeest, 2016) dalam pembaruan kajian territorialization menjelaskan bahwa rezim kolonialisme bekerja melalui penataan ruang dan klasifikasi wilayah guna menciptakan keteraturan administratif. Oleh sebab itu, pemisahan Ketapik Timur dan Barat dapat dipahami sebagai praktik rezim kolonial dalam memetakan dan mengontrol populasi, bukan sekadar pembagian geografis alami.

Perubahan paling signifikan terjadi ketika Belanda membangun jalan penghubung antara Muntok dan Pangkalpinang. Pembangunan infrastruktur ini, menurut keterangan narasumber, mendorong komunitas lokal untuk menetap secara permanen di sekitar jalur jalan agar mudah didata dan diawasi. Dalam perspektif teori kekuasaan kontemporer, pembangunan jalan bukan semata berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan spasial. (Vaughan & McKay (Vaughan & McKay, 2019) menjelaskan bahwa rezim kolonialisme modern memanfaatkan infrastruktur sebagai teknologi kontrol sosial. Dengan kata lain, jalan rezim kolonial menjadi medium yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan wilayah pinggiran sekaligus memungkinkan penetrasi administratif yang lebih efektif. Ingatan narasumber bahwa kebijakan ini berkaitan dengan upaya mencegah pemberontakan seperti yang pernah dipimpin oleh Depati Amir memperlihatkan kesinambungan antara pengalaman perlawanan abad ke-19 dan kebijakan kontrol abad ke-20.

Pada dekade 1920-an, Kampung Ketapik Barat berkembang menjadi pusat penyerahan pajak bagi dusun-dusun kecil di sekitarnya. Wawancara menyebutkan bahwa hasil bumi diserahkan di kampung tersebut sebelum diteruskan ke otoritas rezim kolonial. Praktik ini menunjukkan integrasi kampung ke dalam sistem ekonomi rezim kolonial. Comaroff (Comaroff & Comaroff, 2016) menjelaskan bahwa sistem pajak rezim kolonial bukan sekadar mekanisme fiskal, melainkan alat pembentukan struktur sosial dan ketergantungan ekonomi. Melalui pajak, negara rezim kolonial mengkonstruksi relasi subordinasi sekaligus menormalisasi kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari komunitas lokal. Oleh sebab itu, posisi Kampung Ketapik Barat sebagai pusat penyerahan pajak menandai transisi dari komunitas mobil menjadi komunitas yang terikat dalam jaringan administratif rezim kolonial.

Aspek yang paling menarik dalam wawancara adalah asal-usul nama "Kacung". Menurut narasumber, istilah tersebut muncul karena komunitas lokal setempat dahulu bekerja sebagai pemikul tandu orang kaya atau pekerja perkebunan sehingga disebut "kacung", yang berarti pesuruh atau orang suruhan. Dalam perspektif teori konstruksi jati diri sosial, pelabelan seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk kategorisasi yang menciptakan hierarki antara kelompok penjahat dan kelompok terjahat. (Reicher et al., 2019) Kajian konstruksi jati diri sosial mutakhir menjelaskan bahwa konstruksi jati diri terbentuk melalui proses kategorisasi dan relasi kekuasaan

antara in-group dan out-group. Sementara itu, pembacaan ulang terhadap pemikiran Edward Said melalui Basri (Basri, 2019) memperlihatkan bahwa rezim kolonialisme membangun konstruksi jati diri inferior terhadap kelompok pribumi melalui bahasa dan representasi sosial. Oleh sebab itu, nama “Kacung” dapat dipahami sebagai produk wacana rezim kolonial yang kemudian dinegosiasikan ulang oleh komunitas lokal menjadi konstruksi jati diri kolektif kampung. Momentum penting lainnya terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ketika kampung tersebut mulai diinstitusionalisasikan secara administratif pada 1946. Restrukturisasi desa-desa pascakemerdekaan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara baru untuk menggantikan sistem rezim kolonial dengan sistem republik. Dalam konteks Kampung Kacung, pengakuan administratif tahun 1946 menjadi simbol transformasi dari wilayah yang dibentuk oleh kontrol rezim kolonial menjadi entitas yang diakui dalam struktur negara merdeka.

Periode Agresi Militer Belanda 1947–1949 meninggalkan memori kolektif yang kuat di kalangan komunitas lokal kampung. Narasumber mengingat adanya penggeledahan rumah dan kehadiran opsir-opsir Belanda yang menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, menariknya, terdapat keyakinan bahwa dukun kampung dan ketua kampung memiliki otoritas simbolik yang dihormati bahkan oleh aparat rezim kolonial. Fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep everyday resistance yang diperbarui oleh Scott (SCOTT, 2017), di mana resistensi tidak selalu berbentuk perlawanan terbuka, tetapi juga melalui simbol, otoritas lokal, dan kepercayaan kolektif. Kepercayaan terhadap figur dukun mencerminkan keberlanjutan struktur sosial tradisional yang tidak sepenuhnya dapat dihancurkan oleh kekuasaan militer rezim kolonial.

Secara menyeluruh, rekonstruksi sejarah Kampung Kacung memperlihatkan bahwa pembentukan kampung dapat dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara kebijakan rezim kolonial, dinamika ekonomi, dan negosiasi konstruksi jati diri sosial. Nama kampung yang awalnya berkonotasi subordinatif berubah menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas komunitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengangkat sejarah yang sebelumnya hanya berada dalam ranah folklore menjadi analisis akademik berbasis teori dan literatur mutakhir. Oleh sebab itu, penelitian ini bukan semata memperkaya historiografi Bangka Barat, tetapi juga memperlihatkan bahwa sejarah lokal memiliki signifikansi dalam memahami bagaimana rezim

kolonialisme membentuk konstruksi jati diri sosial hingga tingkat komunitas terkecil.

## **METODE**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sejarah sosial yang menggabungkan metode heritage oral history dan kajian pustaka kritis. Pendekatan ini dipilih karena sejarah Kampung Kacung di Bangka Barat selama ini lebih banyak hidup dalam bentuk folklore dan ingatan kolektif komunitas lokal serta belum terdokumentasi secara akademik. Sejarah lisan memungkinkan rekonstruksi pengalaman komunitas yang tidak tercatat dalam arsip rezim kolonial formal, sekaligus menangkap dimensi subjektif berupa makna, emosi, dan persepsi komunitas lokal terhadap peristiwa masa lalu (Abrams, 2016). Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur terhadap informan kunci seperti tokoh adat, keturunan pendiri kampung, dan warga lanjut usia. Pendekatan heritage digunakan untuk menempatkan narasi tersebut sebagai bagian dari warisan budaya takbenda yang membentuk konstruksi jati diri komunitas (Smith, 2017).

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yakni membandingkan narasi antar-informan serta mengujinya dengan sumber tertulis dan literatur akademik (Perks & Thomson, 2016). Data wawancara ditranskripsi, dikoding secara tematik, lalu dianalisis secara interpretatif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan posisi subjektif informan. Dalam sejarah lisan, akurasi faktual tidak dipisahkan dari makna yang dibangun melalui memori kolektif, sehingga analisis juga diarahkan pada bagaimana komunitas lokal memahami dan merepresentasikan pengalaman rezim kolonial mereka (Portelli, 2018).

Sebagai pelengkap, kajian pustaka dilakukan secara sistematis terhadap jurnal nasional dan internasional terbitan 2016 ke atas untuk memperkuat landasan teoritis mengenai rezim kolonialisme sebagai relasi kuasa dan konstruksi jati diri sosial kontemporer. Literatur digunakan bukan sekadar sebagai pelengkap deskriptif, melainkan sebagai perangkat analisis konseptual untuk menempatkan temuan lokal

dalam kerangka historiografi yang lebih luas (Snyder, 2019). Melalui integrasi sejarah lisan dan kajian teoritis, penelitian ini menghasilkan rekonstruksi sejarah lokal yang bersifat analitis, empiris, dan kontributif terhadap pembaruan historiografi Bangka Barat.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Pra-Pemukiman (awal 1900-an)**

Sebelum terbentuk sebagai unit sosial bernama Kampung Kacung, wilayah ini berada dalam lanskap mobilitas yang dinamis. Secara historis, Pulau Bangka dapat dipahami sebagai wilayah ekonomi ekstraktif berbasis timah yang telah terintegrasi dalam jaringan perdagangan global sejak abad ke-18. Namun demikian, ruang ini tidak pernah benar-benar kosong. Ia dapat dipahami sebagai zona perlintasan dan hunian sementara bagi kelompok pekerja tambang, peladang berpindah, serta jaringan kekerabatan yang bergerak mengikuti siklus ekonomi dan ekologis. Oleh sebab itu, fase pra-pemukiman tidak dapat dipahami sebagai tahap “awal yang statis”, melainkan sebagai fase transisional yang ditandai oleh mobilitas sosial dan spasial.

Temuan wawancara memperlihatkan bahwa kelompok awal yang mendiami kawasan ini tidak serta-merta membangun struktur kampung permanen. Mereka datang sebagai pekerja yang terhubung dengan aktivitas tambang dan perkebunan, lalu membentuk hunian semi permanen di sekitar jalur distribusi ekonomi. Pola ini sejalan dengan temuan Li (Li, 2017) yang memperlihatkan bahwa dalam banyak wilayah rezim kolonial Asia Tenggara, mobilitas tenaga kerja bersifat sirkuler dan tidak selalu berujung pada pembentukan komunitas tetap. Pola sirkulasi tersebut menciptakan ruang sosial yang lentur, di mana konstruksi jati diri kolektif belum sepenuhnya terinstitusionalisasi.

Dalam konteks Nusantara yang lebih luas, mobilitas seperti ini bukan fenomena baru. Kajian mengenai migrasi internal Indonesia memperlihatkan bahwa komunitas lokal agraris dan pekerja tambang memiliki tradisi berpindah mengikuti peluang ekonomi dan akses lahan (McCarthy & Robinson, 2016). Bahkan sebelum adanya kebijakan transmigrasi formal abad ke-20, pola pergerakan penduduk antarpulau telah

berlangsung melalui jaringan kerja, perdagangan, dan hubungan patronase. Mobilitas tersebut membentuk komunitas-komunitas hibrid yang konstruksi jati dirinya cair dan terbuka terhadap negosiasi sosial.

Pada tataran yang lebih luas, studi tentang nomadisme agraris dan mobilitas komunitas Melayu memperlihatkan bahwa pembentukan kampung sering kali dapat dipahami sebagai hasil dari konsolidasi bertahap, bukan perencanaan formal dalam banyak kasus, kampung terbentuk setelah populasi mencapai stabilitas ekonomi minimum yang memungkinkan pengakuan administratif. Artinya, pra-pemukiman Kampung Kacung dapat dipahami sebagai fase embrional di mana komunitas lokal hidup dalam orbit ekonomi rezim kolonial namun belum memiliki legitimasi struktural sebagai entitas sosial otonom.

Dari perspektif rezim kolonialisme sebagai relasi kuasa, fase mobilitas ini penting karena memperlihatkan bahwa rezim kolonialisme tidak selalu menciptakan ruang dari nol, melainkan mengintervensi jaringan sosial yang telah ada. Territorialization rezim kolonial bekerja dengan mengkristalkan mobilitas menjadi struktur tetap. Ketika negara rezim kolonial mulai melakukan pencatatan dan klasifikasi, ruang yang sebelumnya cair berubah menjadi unit yang dapat diawasi. Oleh sebab itu, pra-pemukiman Kampung Kacung mencerminkan transisi dari ruang mobilitas tradisional Nusantara menuju ruang yang semakin terdokumentasi dan terkontrol.

### **Administrasi Kolonial dan Pembagian Ketapak Timur dan Barat**

Perubahan paling signifikan dalam sejarah kawasan ini terjadi ketika administrasi rezim kolonial mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam struktur pemerintahan formal. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Bangka diorganisasi dalam sistem administratif afdeling, sebuah unit pemerintahan rezim kolonial yang berada di bawah kontrol residen dan asisten residen. Menurut Anderson (Anderson, 2018), struktur afdeling di Bangka dirancang untuk memastikan efisiensi pengelolaan tambang timah sekaligus memaksimalkan pengawasan terhadap populasi lokal. Sistem ini membagi wilayah ke

dalam unit-unit administratif yang lebih kecil untuk mempermudah pencatatan pajak, tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi.

Dalam kerangka tersebut, pembagian Ketapik Timur dan Ketapik Barat dapat dipahami sebagai bagian dari strategi administratif rezim kolonial yang lebih luas. Pembagian ini bukan sekadar pemisahan geografis, tetapi juga mekanisme segmentasi sosial yang memungkinkan negara rezim kolonial melakukan kontrol diferensial terhadap populasi. Anderson menegaskan bahwa dalam sistem afdeling, pembagian wilayah sering kali tidak mempertimbangkan batas sosial adat, melainkan kebutuhan ekonomi dan keamanan rezim kolonial. Akibatnya, struktur administratif baru sering kali mengubah konfigurasi sosial lokal.

Pembagian Ketapik Timur dan Barat, sebagaimana terungkap dalam wawancara, berkaitan dengan kebutuhan pengaturan pajak dan pengawasan mobilitas. Dalam perspektif spatial governance, praktik ini mencerminkan teknologi kekuasaan yang menata ruang agar dapat diadministrasikan secara rasional (Vaughan & McKay, 2019). Kolonialisme bekerja melalui penciptaan batas-batas yang sebelumnya tidak tegas, lalu menginstitusikannya sebagai realitas administratif. Masyarakat kemudian diposisikan dalam kategori teritorial tertentu yang menentukan kewajiban dan hak mereka.

Di samping itu, pembagian administratif ini berimplikasi pada pembentukan konstruksi jati diri teritorial. Ketika komunitas lokal mulai diidentifikasi sebagai bagian dari Ketapik Timur atau Barat, muncul diferensiasi sosial berbasis lokasi administratif. Dalam teori konstruksi jati diri sosial kontemporer, kategorisasi seperti ini berpotensi membentuk batas simbolik antar kelompok (Reicher et al., 2019). Dengan kata lain, rezim kolonialisme bukan semata mengatur ekonomi, tetapi juga memproduksi konstruksi jati diri berbasis wilayah. Pada tataran yang lebih luas, sistem afdeling memperlihatkan bahwa rezim kolonialisme di Bangka beroperasi melalui rasionalisasi birokrasi modern. Administrasi, pencatatan pajak, dan pengawasan populasi menjadi fondasi pembentukan negara rezim kolonial. Struktur ini kemudian diwarisi, dimodifikasi, dan diadaptasi dalam sistem

pemerintahan pascarezim kolonial. Oleh sebab itu, pembagian Ketapik Timur Barat tidak dapat dipahami sebagai peristiwa administratif sederhana, melainkan sebagai bagian dari transformasi struktural yang mengikat ruang lokal ke dalam jaringan kekuasaan rezim kolonial global.

### **Infrastruktur Jalan & Pengawasan**

Pembangunan infrastruktur jalan di Bangka tidak dapat dipahami semata sebagai proyek modernisasi ekonomi, melainkan sebagai strategi politik rezim kolonial untuk memperkuat kontrol wilayah pascaperlawanan lokal. Setelah perlawanan yang dipimpin oleh Depati Amir pada pertengahan abad ke-19, pemerintah rezim kolonial menghadapi kenyataan bahwa lemahnya akses transportasi dan terbatasnya konektivitas antarwilayah menyulitkan mobilisasi militer serta pengawasan penduduk. Dalam konteks tersebut, pembangunan jalan menjadi bagian dari upaya stabilisasi kekuasaan dan pencegahan resistensi lanjutan. Infrastruktur bukan semata memfasilitasi distribusi komoditas timah, tetapi juga memungkinkan penetrasi negara rezim kolonial hingga ke unit sosial terkecil.



Gambar 1.1 Jalan di Kampung Kacung  
Tahun 1914

Sumber:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE\\_TROPENMUSEUM\\_Straat\\_in\\_Katjoeng\\_TMnr\\_60048680.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Straat_in_Katjoeng_TMnr_60048680.jpg)

Kajian rezim kolonialisme kontemporer menempatkan infrastruktur sebagai instrumen spatial control yang krusial dalam pembentukan negara rezim kolonial modern. Peluso dan Vandergeest (Peluso & Vandergeest, 2016) memperlihatkan bahwa pembangunan jaringan jalan di wilayah koloni berfungsi untuk mengintegrasikan daerah perifer ke dalam sistem administrasi pusat sekaligus memudahkan pemantauan mobilitas tenaga kerja. Jalan memungkinkan arus informasi, pasukan, dan komoditas bergerak secara cepat, sehingga memperkecil ruang bagi konsolidasi perlawanan lokal. Dengan kata lain, jalan dapat dipahami sebagai perangkat material dari relasi kuasa rezim kolonial.

Dalam perspektif biopolitik, pembangunan jalan juga berkaitan dengan pengelolaan populasi. Mbembe (Mbembe, 2017) menegaskan bahwa rezim kolonialisme bekerja melalui pengaturan ruang hidup komunitas lokal, termasuk menentukan di mana orang dapat tinggal, bekerja, dan bergerak. Setelah pengalaman resistensi, pengawasan terhadap mobilitas menjadi prioritas. Jalan membuka akses langsung aparat rezim kolonial ke kampung-kampung yang sebelumnya relatif terisolasi. Oleh sebab itu, ruang yang dahulu menjadi tempat persembunyian atau konsolidasi komunitas kini berada dalam jangkauan administratif dan militer.

Data wawancara memperlihatkan bahwa keberadaan jalan mempercepat transformasi hunian semi permanen menjadi permukiman yang lebih terstruktur. Aksesibilitas meningkatkan interaksi ekonomi, tetapi secara simultan memperkuat integrasi ke dalam sistem rezim kolonial. Vaughan dan McKay (Vaughan & McKay, 2019) menyebut fenomena ini sebagai paradoks infrastruktur rezim kolonial: ia menghadirkan modernitas sekaligus memperdalam subordinasi. Jalan memberi kemudahan ekonomi, namun pada saat yang sama menegaskan kehadiran negara rezim kolonial sebagai otoritas permanen.

Pada tataran yang lebih luas, pembangunan jalan pascaperlawanan juga berfungsi simbolik. Ia menandai klaim teritorial negara rezim kolonial atas ruang yang sebelumnya menjadi arena konflik. Dalam kerangka teori konstruksi jati diri

sosial, perubahan lanskap fisik semacam ini turut membentuk kesadaran kolektif komunitas lokal tentang posisi mereka dalam struktur kekuasaan. Ruang yang terhubung oleh jalan bukan lagi ruang “bebas”, melainkan ruang yang dapat diawasi dan diintervensi sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, infrastruktur jalan di sekitar wilayah Kampung Kacung bukan semata merepresentasikan kemajuan ekonomi, tetapi juga manifestasi konkret dari strategi rezim kolonial untuk memastikan stabilitas dan mencegah kebangkitan resistensi seperti yang pernah dipimpin oleh Depati Amir.

### **Struktur Pajak, Integrasi Ekonomi, dan Konstruksi Identitas “Kacung”**

Struktur pajak rezim kolonial pada awal abad ke-20 dapat dipahami sebagai fondasi utama integrasi komunitas lokal Bangka ke dalam sistem ekonomi rezim kolonial modern. Pajak bukan semata berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menopang administrasi dan eksploitasi tambang timah, tetapi juga sebagai mekanisme pendisiplinan sosial yang memaksa komunitas lokal masuk ke dalam sistem pencatatan negara. Dalam kerangka rezim kolonial, kewajiban pajak mensyaratkan identifikasi subjek: siapa yang tinggal di mana, memiliki lahan berapa, dan bekerja dalam sektor apa. Oleh sebab itu, pajak menjadi sarana transformasi penduduk lokal menjadi subjek administratif yang terdokumentasi.

Peluso dan Vandergeest (Peluso & Vandergeest, 2016) memperlihatkan bahwa dalam negara rezim kolonial Asia Tenggara, pajak dan registrasi penduduk berjalan beriringan sebagai teknologi pemerintahan. Integrasi ekonomi tidak terjadi secara sukarela, melainkan melalui kewajiban finansial yang mengikat komunitas lokal pada struktur kekuasaan rezim kolonial. Dalam konteks Kampung Kacung, data wawancara memperlihatkan bahwa kewajiban pajak mendorong konsolidasi hunian dan penegasan batas administratif. Masyarakat yang sebelumnya bergerak secara sirkuler dalam orbit ekonomi tambang mulai menetap dan terdaftar sebagai unit pajak tetap. Oleh sebab itu, pajak berperan dalam mengubah mobilitas menjadi permanensi sosial.

Akan tetapi, integrasi ekonomi melalui pajak juga menghasilkan stratifikasi. Mereka yang terhubung langsung dengan ekonomi tambang atau memiliki akses terhadap jaringan patronase rezim kolonial relatif lebih stabil secara finansial. Sebaliknya, kelompok pekerja rendahan buruh tambang, pesuruh, atau tenaga kasar berada pada posisi paling rentan. Dalam konteks inilah istilah “kacung” memperoleh relevansi sosial. Awalnya merujuk pada posisi kerja subordinat, istilah tersebut berkembang menjadi label sosial yang melekat pada kelompok pekerja dalam struktur rezim kolonial.

Comaroff (Comaroff & Comaroff, 2016) menjelaskan bahwa dalam komunitas lokal rezim kolonial, ekonomi dan konstruksi jati diri tidak pernah terpisah. Struktur ekonomi menciptakan kategori sosial yang kemudian dilembagakan melalui bahasa, hukum, dan praktik administratif. Pelabelan terhadap kelompok pekerja sebagai “rendahan” bukan sekadar refleksi posisi ekonomi, melainkan bagian dari produksi hierarki simbolik. Identitas terbentuk melalui relasi kuasa yang menempatkan satu kelompok sebagai pusat dan lainnya sebagai perifer.

Dalam perspektif Brubaker (Brubaker, 2020), konstruksi jati diri bukanlah esensi tetap, melainkan hasil proses kategorisasi sosial. Negara rezim kolonial, melalui sistem pajak dan administrasi, menciptakan kategori-kategori yang membedakan komunitas lokal berdasarkan fungsi ekonomi dan posisi sosial. Label “kacung” dapat dipahami sebagai produk kategorisasi tersebut sebuah penanda yang mengasosiasikan individu atau kelompok dengan kerja subordinat dalam struktur rezim kolonial. Kategori ini tidak netral; ia membawa implikasi moral dan simbolik yang memperkuat hierarki sosial.

Akan tetapi, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelabelan tersebut tidak sepenuhnya diterima secara pasif. Seiring waktu, istilah “Kacung” mengalami proses reappropriasi kolektif. Nama kampung yang semula berkonotasi subordinasi justru menjadi simbol asal-usul dan solidaritas komunitas. Perubahan struktural makna ini memperlihatkan dinamika konstruksi jati diri sosial yang dinegosiasikan dalam pengalaman historis bersama. Dalam kerangka Brubaker (Brubaker, 2020), hal ini

memperlihatkan bahwa kategori sosial dapat direartikulasikan oleh kelompok yang dikategorikan, sehingga konstruksi jati diri menjadi arena kontestasi, bukan sekadar produk dominasi.

Pada tataran yang lebih luas, integrasi ekonomi rezim kolonial melalui pajak memperkuat kohesi internal komunitas. Kewajiban finansial yang ditanggung bersama menciptakan pengalaman kolektif yang membentuk rasa kebersamaan. Comaroff (Comaroff & Comaroff, 2016) menekankan bahwa dalam situasi subordinasi struktural, solidaritas sering muncul sebagai respons terhadap tekanan eksternal. Dalam konteks Kampung Kacung, tekanan fiskal rezim kolonial justru berkontribusi pada pembentukan konstruksi jati diri komunal yang lebih solid.

Oleh sebab itu, struktur pajak rezim kolonial bukan semata berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai mesin produksi konstruksi jati diri sosial. Integrasi ekonomi melahirkan kategorisasi, kategorisasi melahirkan pelabelan, dan pelabelan kemudian dinegosiasikan menjadi konstruksi jati diri kolektif. Proses ini memperlihatkan bahwa sejarah Kampung Kacung bukan sekadar kisah tentang kewajiban fiskal atau posisi kerja subordinat, melainkan tentang bagaimana komunitas mengubah pengalaman struktural rezim kolonial menjadi fondasi solidaritas dan kebanggaan lokal.

### **1946 dan Institusionalisasi Kampung: Dari Ruang Kolonial ke Ruang Nasional**

Tahun 1946 menjadi titik transisi fundamental dalam sejarah Kampung Kacung. Periode ini menandai pergeseran otoritas dari struktur rezim kolonial menuju kerangka negara Indonesia yang baru diproklamasikan. Jika sebelumnya wilayah ini berada dalam sistem administratif rezim kolonial seperti afdeling, maka pascakemerdekaan terjadi proses institusionalisasi ulang melalui pembentukan struktur kampung yang diakui secara formal dalam tata pemerintahan nasional. Perubahan ini bukan semata bersifat administratif, tetapi juga simbolik ia menandai transformasi ruang dari

objek kontrol rezim kolonial menjadi bagian dari komunitas politik nasional.

Institusionalisasi kampung pada 1946 dapat dipahami sebagai proses re-territorialization, yakni penataan ulang ruang dalam logika negara bangsa. Dalam perspektif sejarah sosial, pembentukan struktur kampung dapat dipahami sebagai bentuk konsolidasi konstruksi jati diri kolektif yang sebelumnya terbentuk dalam tekanan rezim kolonial. Struktur kepemimpinan lokal, pencatatan penduduk, dan legitimasi administratif menjadi sarana untuk menegaskan eksistensi komunitas dalam kerangka negara merdeka. Oleh sebab itu, institusionalisasi bukan sekadar pengakuan formal, tetapi juga pernyataan konstruksi jati diri politik.

Perubahan struktural ini memperlihatkan bagaimana kategori sosial yang sebelumnya dibentuk rezim kolonialisme mengalami redefinisi. Identitas “Kacung” yang lahir dalam konteks pelabelan subordinatif tidak lagi ditempatkan dalam hierarki rezim kolonial, melainkan dalam narasi kebangsaan. Dalam perspektif Brubaker (Brubaker, 2020), perubahan konteks politik memungkinkan reinterpretasi kategori sosial. Identitas yang dahulu dilekatkan sebagai simbol subordinasi kini dapat dimaknai ulang sebagai penanda sejarah perjuangan dan ketahanan komunitas.

Pada tataran yang lebih luas, institusionalisasi kampung pada 1946 menunjukkan kesinambungan sekaligus diskontinuitas dengan masa rezim kolonial. Secara struktural, beberapa praktik administratif seperti pencatatan penduduk dan pembagian wilayah tetap dipertahankan. Namun secara ideologis, orientasinya berubah: dari pengawasan rezim kolonial menuju tata kelola nasional. Di sinilah terlihat bahwa warisan rezim kolonial tidak sepenuhnya terhapus, tetapi dinegosiasikan dalam kerangka negara merdeka. Kampung Kacung menjadi contoh bagaimana komunitas lokal mengadaptasi struktur lama untuk tujuan baru.

### **Agresi Militer Belanda dan Memori Kolektif: Trauma, Solidaritas, dan Identitas**

Peristiwa Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II memberikan dampak

mendalam terhadap komunitas lokal Bangka, termasuk Kampung Kacung. Narasi wawancara menggambarkan suasana ketakutan, pembatasan gerak, serta ketidakpastian ekonomi yang kembali menghantui komunitas. Jika institusionalisasi 1946 menandai optimisme kemerdekaan, maka agresi militer menghadirkan kembali pengalaman ancaman eksternal yang menguji solidaritas internal kampung.

Dalam studi memori kolektif, pengalaman traumatik sering kali menjadi fondasi pembentukan konstruksi jati diri bersama. Assmann (Assmann, 2016) menjelaskan bahwa memori kolektif tidak sekadar menyimpan peristiwa, tetapi mengonstruksi makna atasnya dalam kerangka konstruksi jati diri komunitas. Peristiwa agresi militer bukan semata diingat sebagai konflik bersenjata, tetapi sebagai momen ketika komunitas diuji dan dipaksa bersatu. Cerita tentang persembunyian, saling membantu, dan mempertahankan kampung menjadi narasi yang diwariskan lintas generasi.

Olick (Olick, 2016) menekankan bahwa memori kolektif bekerja melalui ritual, cerita lisan, dan simbol-simbol lokal. Dalam konteks Kampung Kacung, sejarah agresi militer tidak selalu tercatat dalam arsip formal, tetapi hidup dalam tuturan keluarga dan ingatan komunal. Di sinilah metode heritage oral history menjadi penting: ia menangkap dimensi emosional dan simbolik yang sering terabaikan dalam historiografi resmi. Memori tersebut memperkuat kesadaran kolektif bahwa kampung bukan sekadar ruang geografis, tetapi ruang perjuangan.

Pada tataran yang lebih luas, pengalaman agresi militer memperkuat transformasi konstruksi jati diri “Kacung”. Jika pada masa rezim kolonial konstruksi jati diri tersebut dilekatkan dalam struktur subordinasi ekonomi, maka dalam konteks konflik kemerdekaan ia berubah menjadi simbol ketahanan komunitas. Solidaritas yang terbentuk dalam menghadapi ancaman eksternal menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat dibanding periode sebelumnya. Dalam kerangka teori konstruksi jati diri sosial (Reicher et al., 2019), ancaman eksternal sering mempertegas batas in-group, memperkuat rasa kebersamaan dan loyalitas internal.

Oleh sebab itu, agresi militer Belanda bukan semata menjadi episode konflik nasional, tetapi juga titik konsolidasi konstruksi jati diri lokal. Memori kolektif atas peristiwa tersebut menegaskan bahwa sejarah Kampung Kacung dapat dipahami sebagai bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa. Identitas yang lahir dari pengalaman rezim kolonial dan pelabelan sosial kini diperkaya oleh narasi ketahanan dan solidaritas dalam menghadapi agresi militer. Sejarah lokal yang semula dianggap folklore terbukti mengandung dimensi politik dan sosial yang signifikan dalam pembentukan konstruksi jati diri komunitas.

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sejarah Kampung Kacung terbentuk melalui rangkaian proses struktural yang berkaitan dengan mobilitas awal komunitas lokal, integrasi ke dalam administrasi rezim kolonial, pembangunan infrastruktur pengawasan pascaperlawanan, serta penerapan sistem pajak yang mengikat komunitas dalam ekonomi rezim kolonial. Proses tersebut bukan semata mengubah lanskap fisik dan struktur sosial, tetapi juga membentuk kategorisasi konstruksi jati diri yang melekat pada komunitas lokal. Pelabelan “kacung” muncul dalam konteks hierarki kerja rezim kolonial dan menjadi representasi posisi subordinat dalam sistem ekonomi tambang.

Perubahan struktural signifikan terjadi pada masa institusionalisasi kampung tahun 1946 dan periode agresi militer Belanda, ketika pengalaman kolektif menghadapi ancaman eksternal memperkuat solidaritas internal komunitas. Identitas yang sebelumnya terbentuk dalam relasi subordinasi rezim kolonial mengalami reinterpretasi sebagai simbol ketahanan dan kebersamaan. Memori kolektif atas pengalaman rezim kolonial dan konflik kemerdekaan menjadi fondasi pembentukan konstruksi jati diri sosial yang diwariskan lintas generasi.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa rezim kolonialisme di tingkat lokal bekerja melalui pengaturan ruang, administrasi, infrastruktur, dan fiskal yang menghasilkan kategorisasi sosial. Identitas komunitas terbentuk melalui interaksi antara

struktur kekuasaan dan pengalaman historis kolektif. Sejarah Kampung Kacung memperlihatkan bahwa komunitas lokal bukan sekadar objek dominasi rezim kolonial, melainkan aktor yang mampu mentransformasikan pengalaman subordinasi menjadi dasar solidaritas dan keberlanjutan sosial. Artikel ini menempatkan sejarah lokal sebagai bagian integral dari dinamika rezim kolonialisme dan pembentukan konstruksi jati diri sosial dalam konteks Indonesia modern.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrams, L. (2016). *Oral History Theory*. Routledge.  
<https://www.routledge.com/Oral-History-Theory/Abrams/p/book/9780415853229>
- Anderson, B. R. O. (2018). Colonial administration and territorial structuring in Bangka. *Indonesia and the Malay World*, 46(135), 203–222.  
<https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1459064>
- Assmann, A. (2016). Shadows of trauma: Memory and the politics of postwar identity. *Memory Studies*, 9(1), 7–18.  
<https://doi.org/10.1177/1750698015609875>
- Basri, N. (2019). Re-reading Edward Said’s Orientalism in Indonesian postcolonial discourse. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 145–158.  
<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v8i2.21345>
- Brubaker, R. (2020). Populism and nationalism in a comparative perspective. *Nations and Nationalism*, 26(1), 44–66.  
<https://doi.org/10.1111/nana.12522>
- Comaroff, J., & Comaroff, J. L. (2016). The politics of difference in an age of revolution. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 6(2), 1–31.  
<https://doi.org/10.14318/hau6.2.003>
- Li, T. M. (2017). After development: Surplus population and the politics of entitlement. *Development and Change*, 48(6), 1247–1261.  
<https://doi.org/10.1111/dech.12343>
- McCarthy, J. F., & Robinson, K. (2016). Land and development in Indonesia: Searching for the

- people's sovereignty. *Asia Pacific Viewpoint*, 57(3), 314–329.  
<https://doi.org/10.1111/apv.12134>
- Olick, J. K. (2016). The sins of the fathers: Germany, memory, method. *Memory Studies*, 9(3), 277–294.  
<https://doi.org/10.1177/1750698016645261>
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2016). Political forests and territorialization in Southeast Asia. *Geoforum*, 76, 143–152.  
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.09.006>
- Perks, R., & Thomson, A. (Eds.). (2016). *The Oral History Reader* (3rd ed.). Routledge.  
<https://www.routledge.com/The-Oral-History-Reader/Perks-Thomson/p/book/9780415704521>
- Portelli, A. (2018). What makes oral history different. *Oral History Review*, 45(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.1093/ohr/ohy001>
- Reicher, S., Haslam, S. A., & Hopkins, N. (2019). Social identity and collective action. *Current Opinion in Psychology*, 23, 1–5.  
<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.10.006>
- Scott, J. C. (2017). *Against the Grain*. Yale University Press.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctv1bvnfk9>
- Smith, L. (2017). Intangible heritage: A challenge to the authorised heritage discourse. *International Journal of Heritage Studies*, 23(5), 385–398.  
<https://doi.org/10.1080/13527258.2016.1263996>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Vaughan, M., & McKay, D. (2019). Colonial governance and spatial ordering in Southeast Asia. *Journal of Historical Geography*, 65, 1–11.  
<https://doi.org/10.1016/j.jhg.2019.05.002>